



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI**  
**SULAWESI TENGGARA**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 34, Kendari 93122;  
Telepon: (0401) 3127191; Surel: djpbsultra@kemenkeu.go.id; Laman: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra

NOTA DINAS  
NOMOR ND-122/WPB.28/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2024 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara  
Tanggal : 24 Januari 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Supervisi pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2024 dan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2024 dilaksanakan dengan dua metode sesuai dengan PER-1/PB/2023, yaitu secara *on the spot* (observasi langsung ke KPPN) dan secara *on desk* dengan metode pengumpulan dokumen yang dilakukan secara daring.
- Berdasarkan hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disimpulkan bahwa:
  - Tema yang diambil adalah “**Peningkatan Kompetensi Pejabat Perbendaharaan dan Dukungan Optimal Financial Advisor dalam Rangka Pengelolaan Anggaran yang Lebih Baik**” mengingat permasalahan yang ditemukan pada periode ini berkisar pada hal tersebut yang saling terkait.
  - Permasalahan utama yang ditemukan terdapat tiga hal pokok yaitu:
    - Kompetensi Pejabat Perbendaharaan Tidak Terstandardisasi sehingga menyebabkan permasalahan lainnya seperti penolakan SPM, retur, data supplier-kontrak tidak akurat, RPD & LPJ tidak akurat, terjadi penumpukan SP2D di akhir tahun;
    - Kegiatan Financial Advisor KPPN sebagai pelaksanaan Shadow Organization belum Optimal;
    - Tidak Adanya SOP Petunjuk Penyaluran Dana Desa sebagai penyebab titik rawan PPK-PPSPM BUN di KPPN banyak menerima pemanggilan keterangan sebagai saksi maupun permintaan dokumen dari APH.
  - Penilaian kinerja KPPN pada periode semester II tahun 2024 mencapai rata-rata 9,88. Rincian nilai kinerja masing-masing KPPN adalah sebagai berikut:

KPPN	Treasurer	Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan Special Mission	Financial Advisor	Tata Kelola Internal	Jumlah
KPPN Tipe A1 Provinsi					
Kendari	2,79	2,00	2,00	3,00	9,79

KPPN	Treasurer	Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan <i>Special Mission</i>	Financial Advisor	Tata Kelola Internal	Jumlah
KPPN Tipe A2					
Bau-Bau	2,94	2,00	2,00	3,00	9,94
Kolaka	2,87	2,00	2,00	3,00	9,87
Raha	2,93	2,00	2,00	3,00	9,93
<b>Jumlah Rata-Rata</b>					<b>9,88</b>

3. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2024 sebagaimana terlampir atau tersedia pada tautan <https://s.id/LHPSSultraSemesterII2024>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Syarwan

Dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa berkomitmen untuk melayani dengan sepenuh hati, serta selalu menjaga integritas, dan menolak segala bentuk gratifikasi.

